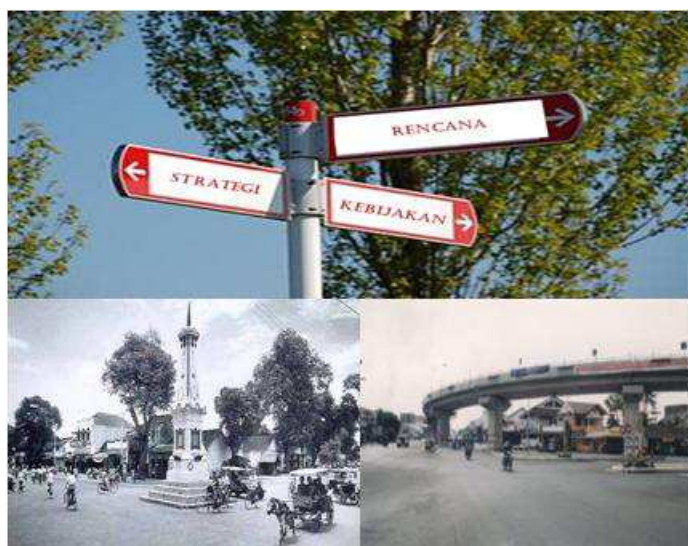




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017 – 2022**



**YOGYAKARTA
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Yogyakarta, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Bappeda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 –2022 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Bab III. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan
- Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2) Sub Bidang Pariwisata dan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- d. Bidang Fisik terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informasi;
 - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman; dan
 - 3) Sub Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan lingkungan hidup.
- e. Bidang Sosial terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) Sub Bidang Aparatur.
- f. Bidang Perencanaan Pengendalian terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Program; dan
 - 3) Sub Bidang Data dan Analisa.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penelitian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan; dan
 - 3) Sub Bidang Inovasi Daerah.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan tugas pokok Bappeda adalah menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol dan
5. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pembangunan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.

Bidang Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perencanaan pembangunan fisik. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang fisik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan fisik;
2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan fisik;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan fisik;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan pembangunan fisik; dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perencanaan pembangunan fisik;

Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pembangunan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan sosial;

2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan sosial;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan sosial;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan pembangunan sosial dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perencanaan pembangunan sosial.

Bidang Perencanaan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pengendalian. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang perencanaan pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pengendalian;
2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pengendalian;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan pengendalian;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan pengendalian; dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perencanaan pengendalian

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang penelitian dan pengembangan; dan

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang penelitian dan pengembangan.

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kepegawaian

No	Jabatan	Jenis		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1	Kepala Bappeda	1		1
2	Sekretaris	-		-
3	Kepala Bidang	3	2	5
4	Kepala Sub Bagian	1	2	3
5	Kepala Sub Bidang	4	9	13
6	Staf	15	8	23
7	Tenaga Bantuan	1		1
	JUMLAH	25	21	46

2. Sarana dan Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	9 ruang
2	Ruang Rapat	5 ruang
3	Ruang Perpustakaan	1 ruang
4	Kendaraan Roda 4	3 unit
5	Kendaraan Roda 2	24 unit
6	Wireles Public Address	1 unit
7	Sound system	2 unit
8	Camera Digital	2 unit
9	Handycamp	1 unit
10	Komputer PC	20 unit
11	Printer	15 unit
12	LCD Proyektor	5 unit
13	Laptop	15 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta pada periode renstra sebelumnya (2012 – 2016). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Bappeda selama periode 2012 – 2016. Dalam semua sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang sempurna, yaitu 100%.

Namun demikian, jika dicermati pada tabel selanjutnya, yaitu yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%. Program pengembangan data dan informasi memiliki rasio realisasi tertinggi diantara semua program, yaitu dengan kisaran 92,5% - 98%, yang jika dirata-rata dalam lima tahun adalah 95,36%. Program yang memiliki rasio tidak terlalu tinggi adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program yang kesemuanya berorientasi internal tersebut memiliki kisaran rata-rata rasio antara 67% - 77%. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%, termasuk pada ketiga program internal yang memiliki rasio serapan terendah tersebut.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	INDIKATOR SASARAN																		
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kesesuaian Antara Muatan RKPD dengan RPJMD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Kesesuaian Antara Muatan RPJMD dengan RPJPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Ketersediaan Data Bagi Penyusunan Rencana Pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kesesuaian Kajian Dengan Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Pembangunan Manusia				79,52 - 79,57	79,54 - 79,59	79,56 - 79,61	80,01 - 80,06	80,03 - 80,08	80,24	80,51	80,51	83,78	84,56	101%	101%	101%	105%	106%
7	Pertumbuhan Ekonomi				4,85% - 5,15%	4,92% - 5,8%	4,99% - 5,3%	4,99% - 5,5%	4,99% - 5,7%	5,76	5,64	5,3	5,46	5,16	112%	100%	100%	100%	100%
8	Pendapatan Perkapita				Rp. 15,302 juta	Rp. 16,306 juta	Rp. 16,856 juta	Rp. 17,301 juta	Rp. 17,856 juta	Rp. 48,702 juta	Rp. 50,262 juta	Rp. 53,207 juta	Rp. 54,259 juta	Rp. 56,346 juta	318%	308%	316%	314%	316%
9	Angka Kemiskinan				11%	9%	8,8%	8,6%	8,4%	9,38	8,82	8,67	8,75	7,7	100%	147%	750%	86%	-29%

II	INDIKATOR PROGRAM																		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																		
	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		
	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																		
	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																		
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda/Perwal				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam perwal				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN																		
	Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI																		
	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan informasi pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	PROGRAM PENATAAN KAWASAN SUNGAI																		
	Cakupan penataan kawasan sungai				3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	3 sungai	100%	100%	100%	100%	100%
10	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN																		
	Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan				45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	45 kel	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kota Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	533.049.410	733.881.472	743.189.300	887.894.492	631.801.080	506.237.745	598.224.762	660.418.804	774.914.274	536.630.185	94,97%	81,52%	88,86%	87,28%	84,94%	87,51%	0,07	0,04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.021.500	96.935.500	197.764.000	277.956.000	187.204.500	57.126.539	55.305.500	132.868.450	217.856.615	111.439.628	70,51%	57,05%	67,19%	78,38%	59,53%	66,53%	0,33	0,38
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			28.390.000	31.695.000	31.500.000			21.583.000	29.805.000	19.662.000			76,02%	94,04%	62,42%	77,49%	-0,22	0,09
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		35.645.000	32.500.000	59.322.500	30.430.000		9.840.500	23.438.940	54.038.110	27.556.750		27,61%	72,12%	91,09%	90,56%	70,34%	0,06	0,55
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.396.305.500	1.349.392.500	2.046.260.500	2.202.621.650	1.782.483.300	1.246.436.375	1.215.746.500	1.575.513.775	1.995.710.171	1.671.798.055	89,27%	90,10%	76,99%	90,61%	93,79%	88,15%	0,09	0,09
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	607.981.250	802.370.000	989.096.000	1.562.913.400	1.975.941.300	535.493.875	760.374.375	732.765.500	1.507.849.525	1.593.645.330	88,08%	94,77%	74,08%	96,48%	80,65%	86,81%	0,35	0,37
Program Penataan Kawasan Sungai		343.832.500	160.067.500	103.374.100	479.195.700		300.268.500	144.002.500	98.776.350	290.703.875		87,33%	89,96%	95,55%	60,66%	83,38%	0,69	0,28
Program Penanggulangan Kemiskinan		761.268.600	854.944.800	726.120.300	1.032.539.220		603.774.250	728.725.715	626.940.844	885.901.035		79,31%	85,24%	86,34%	85,80%	84,17%	0,10	0,12
Program Pengembangan Data/Informasi	965.921.450	1.449.197.650	1.275.713.850	1.594.817.132	1.744.333.680	948.549.300	1.373.894.940	1.179.863.330	1.549.024.250	1.642.557.015	98,20%	94,80%	92,49%	97,13%	94,17%	95,36%	0,18	0,17
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	570.862.500	675.497.500	670.073.500	608.981.000	1.550.955.000	471.500.250	616.787.250	600.822.830	504.260.200	1.449.547.500	82,59%	91,31%	89,67%	82,80%	93,46%	87,97%	0,41	0,50

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelaksana Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perencana tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Perencana di Tingkat Nasional (Bappenas).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus

dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.
- b) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.
- c) Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.
- d) Komitmen perencanaan dengan OPD.
- e) Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a) Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda DIY.
- b) Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD.
- c) Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- d) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- e) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
- f) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- g) Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
- h) Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
- i) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- j) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tingkatan Kota secara umum, dalam RPJMD, terdapat 14 isu strategis yang hendak direspon menjadi focus pembangunan Lima tahun kedepan. Beberapa diantaranya menarik untuk dicermati, terutama terkait dengan ketugasan Bappeda sebagai institusi perencana daerah. Yang pertama adalah **kemiskinan** perkotaan, dimana Kota Yogyakarta merupakan penyumbang angka kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta, yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan Nasional (DIY = 13,02; Nasional = 10,96). Beberapa penanggulangan kemiskinan yang selama ini terus dilakukan masih dinilai kurang tepat sasaran, disebabkan salah satunya karena terdapat kesenjangan data antara penerima manfaat penjaminan. Persoalan kemiskinan meski dilihat dari berbagai dimensi, tidak semata-mata permasalahan ekonomi saja, sehingga upaya penanggulangnya juga mesti dilakukan secara komprehensif, lintas sector dan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait. Sementara itu, isu *keberdayaan masyarakat*, selain terfokus pada pemberdayaan masyarakat secara umum, persoalan yang juga sering muncul adalah terkait dengan perempuan dan anak, khususnya persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu akar permasalahannya adalah lemahnya kondisi ekonomi, dimana penanganannya secara tidak langsung adalah terkait dengan isu penanggulangan kemiskinan juga.

Ketimpangan pendapatan merupakan isu strategis selanjutnya yang perlu mendapat banyak perhatian. Secara kasuistik, 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah diantaranya banyak terdapat di wilayah yang secara kebetulan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi, yaitu di Gedongtengen, Jetis dan Gondomanan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan tersebut kurang bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat lapisan bawah. Strategi utama dalam konteks ini adalah dengan memberdayakan UMKM, dimana prioritas ditujukan pada pelaku ekonomi yang terkait dengan sector pariwisata. Dalam hal ini, disamping intervensi langsung dari pemerintah, BUMD juga diharapkan peran-sertanya. Disamping itu, ketimpangan antar wilayah juga menjadi *concern* tersendiri, dimana kawasan selatan Yogyakarta cenderung lebih sepi aktivitas ekonominya relative terhadap kawasan utara. Untuk itu, berbagai strategi pembangunan dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi di Yogyakarta selatan makin digalakan, diantaranya dengan penciptaan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru, diantaranya adalah pembangunan XT-Square dan rencana pembangunan Science Center. Semua upaya tersebut juga secara tidak langsung berdampak pada isu strategis selanjutnya, yaitu *pertumbuhan ekonomi*. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki banyak pusat aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan

sector pariwisata, namun secara umum tingkat pertumbuhan tersebut masih dibawah nasional sehingga diperlukan upaya-upaya lebih lanjut, yang diantaranya selain dengan pengembangan UMKM adalah sector industry, khususnya yang memiliki kontribusi cukup signifikan adalah industry olahan. Disamping itu, isu *investasi* selain dalam dirinya sendiri menjadi isu strategis, juga bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Survey kemudahan bisnis di Indonesia menempatkan Kota Yogyakarta diperingkat teratas, yang berarti bahwa melakukan bisnis di Yogya relative lebih mudah dibanding didaerah-daerah lain. Yang juga menjadi tantangan disini adalah kemudahan tersebut juga mesti diupayakan sebanding dengan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan wilayah, sehingga secara keseluruhan bisa mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Beberapa isu strategis lainnya terkait dengan **ketentraman dan ketertiban masyarakat, pendidikan, kesehatan, budaya, penataan ruang dan lingkungan hidup**. Isu ketentraman dan ketertiban masyarakat didasari kesadaran bahwa kondisi masyarakat Kota Yogyakarta yang heterogen dan kompleks, sehingga menjadikan upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban semakin rumit. Dalam bidang pendidikan, tingginya minat bersekolah di Kota Yogyakarta baik dari luar maupun dalam Kota menjadi tantangan tersendiri. Peningkatan kualitas sekaligus mewujudkan pendidikan yang inklusif merupakan agenda pokok untuk Lima tahun kedepan. Harapan hidup masyarakat merupakan isu strategis yang didalamnya mencakup isu-isu pembangunan bidang kesehatan, yang meliputi pemberdayaan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kasus penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan limbah medis, pemenuhan standar layanan kesehatan, dan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga Kota. Selanjutnya, Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, dimana isu strategis didalamnya adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, warisan-warisan budaya bisa terus dilestarikan sekaligus diupayakan revitalisasinya dalam konteks kehidupan modern.

Isu penyelenggaraan penataan ruang menyorot pada belum optimalnya kerja-kerja OPD tata ruang yang baru berdiri. Kedepan diharapkan OPD tersebut bisa menghasilkan regulasi-regulasi keruangan yang efektif melalui peran dan kerjasama lintas sector, dan mampu menangani persoalan alih fungsi lahan dan keterbatasan ruang public, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Sebagian isu tata ruang tersebut sifatnya sangat *urgent* untuk diselesaikan, yaitu terkait dengan *kualitas lingkungan hidup*, sehingga menjadi satu isu strategis tersendiri disamping tata ruang secara umum. Persoalan di Kota Yogyakarta adalah ruang terbuka hijau public masih jauh dari memenuhi proporsi yang seharusnya sebesar 30%. Kecenderungan adanya alih fungsi lahan dari ruang public menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang public pengganti dikhawatirkan menjadi permasalahan social tersendiri.

Masih terkait dengan isu keruangan adalah **infrastruktur wilayah**. Kota Yogyakarta yang memiliki luas hanya 32,5 km² telah mengalami perkembangan perkotaan yang jauh melebihi batas-batas administratifnya. Sekarang wilayah perkotaan Yogyakarta juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebagai akibatnya, interaksi antar wilayah tersebut berkembang pesat, saling terhubung antar satu dengan lainnya. Hal ini menyebabkan, persoalan yang muncul di Kota Yogyakarta tidak semuanya bisa diselesaikan sendiri dalam perencanaan pembangunan, melainkan perlu melibatkan Kabupaten Sleman dan Bantul. Dalam hal ini, sekretariat bersama KARTAMANTUL mendudukan Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul dalam satu meja untuk melakukan kerjasama penanganan masalah persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan dan transportasi.

Disamping isu-isu strategis tingkat Kota tersebut, Bappeda secara internal juga memiliki beberapa isu strategis, diantaranya adalah terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana juga dirasa kurang mencukupi. Disamping itu, kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada penyusunan rencana pembangunan juga belum optimal dilakukan. Dalam hal kelembagaan, perubahan struktur yang baru-baru ini dilakukan juga masih memerlukan adaptasi untuk melihat efektivitasnya dalam mengampu ketugasan Bappeda sebagai lembaga perencana di tingkat daerah.

Selain itu, ditengah perubahan-perubahan besar yang terjadi diberbagai aspek dan tingkatan, ada beberapa potensi yang mendukung sekaligus dalam skala tertentu menjadi tantangan bagi Bappeda dalam jangka waktu Lima tahun kedepan. Berikut merupakan beberapa potensi tersebut;

- a. Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
- b. Semangat otonomi dan desentralisasi yang kuat.
- c. Potensi sumber daya daerah menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan pembangunan.
- d. Kultur dan sosial yang kuat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.
- e. Jumlah dan kualitas penduduk yang cukup memadai.
- f. SDM Bappeda dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- g. Anggaran yang cukup memadai.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam RPJMD 2017 – 2022, visi Walikota terpilih dirumuskan sebagai berikut:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”.

Sebagai ***kota nyaman huni*** Yogyakarta di-visi-kan sebagai kota dimana kualitas hidup masyarakatnya tinggi; memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai; pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus mengalami peningkatan; perekonomian yang terus berkembang; serta tersedianya ruang yang kondusif bagi pengkayaan nilai-nilai dan aktivitas sosial dan budaya. Sementara itu sebagai ***pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat***, kota Yogyakarta diproyeksikan sebagai kota yang memiliki fasilitas penunjang yang memadai; system pelayanan yang mudah, cepat dan kondusif; aktivitas sector pariwisata dan pendidikan yang terus meningkat; system produksi dan distribusi yang terus diperbaiki; dan menguatnya identitas kota sebagai basis kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian system pergerakan antar kota. Orientasi pada ***keberdayaan masyarakat*** dimaknai sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dalam gaya hidup sehat dan bersih, etos kerja berkemajuan, peluang kerja, dan berkembangnya kemitraan social. Terakhir, ***berpijak pada nilai keistimewaan*** dijabarkan sebagai semangat nilai keistimewaan Yogyakarta yang dijunjung tinggi sekaligus sebagai dasar pijak dalam pengembangan pemerintahan, pelayanan, aktivitas kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pembangunan, serta penguatan identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan dan pariwisata.

Perwujudan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, social dan budaya
5. Memperkuat tata kelola dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana public dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kota, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan ketujuh misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Bappeda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Walikota terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi ketujuh, yaitu ***meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih***. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sasarannya adalah tata kelola pemerintahan yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sector, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan factor kunci tercapainya misi tersebut.

Selain misi yang ketujuh, Bappeda berperan untuk pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan. Misi pertama, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta, yaitu dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya keberdayaan dan ketahanan pangan masyarakat. Penurunan kemiskinan masyarakat ditempuh dengan strategi peningkatan perlindungan dan jaminan social, peningkatan advokasi dan rehabilitasi social, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan social. Sasaran peningkatan keberdayaan masyarakat ditempuh dengan strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat secara umum, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, peningkatan perlindungan anak, serta peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan di 14 Kecamatan. Sasaran terakhir, yaitu meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dilakukan melalui strategi peningkatan ketahanan pangan secara umum, peningkatan pembinaan budidaya dan produk kehewanian dan perikanan, serta peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil pertanian.

Proses perencanaan dan pengendalian yang dikoordinasikan Bappeda mencakup urusan kesejahteraan rakyat serta urusan prindustrian dan perdagangan, yang didalamnya termasuk isu ketahanan pangan. Dalam hal pencapaian misi pertama, sub bidang kesejahteraan rakyat dibawah bidang social mengemban amanah untuk berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, sub bidang perindustrian dan perdagangan, dibawah bidang ekonomi, mencakup koordinasi perencanaan dan pengendalian urusan ketahanan pangan. Selain itu, persoalan kemiskinan memiliki sifat lintas sector yang akan sukar penyelesaiannya jika hanya melibatkan satu atau dua OPD untuk mengintervensinya. Oleh karenanya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sector memiliki secretariat di Bappeda sebagai pusat koordinasi. Dalam hal ini, tentu saja Bappeda diharapkan untuk secara pro-aktif

melibatkan dan mendorong peran serta berbagai pemangku sector dan pemangku kepentingan untuk ikut bersama-sama menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, sesuai dengan tugas dan kompetensi masing-masing.

Misi kedua, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota, dipahami dalam konteks tingginya tingkat ketimpangan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk merupakan salah satu sasaran kunci daerah yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pengoptimalan pengembangan dan penempatan tenaga kerja menjadi satu strategi kunci. Selain itu, potensi-potensi kelembagaan ekonomi mikro-kecil dan koperasi juga sangat penting untuk diberdayakan dan dioptimalisasi produktivitasnya. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tolok ukur penting untuk mencapai misi kedua ini. Naiknya PDRB per-kapita, dengan dibarengi turunnya tingkat ketimpangan, merupakan indicator menguatnya ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatnya daya saing kota Yogyakarta. Untuk mencapainya, simpul-simpul bisnis, yaitu industry dan perdagangan –termasuk didalamnya adalah pasar- sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Salah satu sector kunci, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, juga terus akan didukung pengembangannya dengan berbagai pengelolaan, promosi dan pembinaan. Terakhir, investasi juga merupakan factor yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang tumbuhnya perekonomian di kota Yogyakarta. Untuk kepentingan tersebut, peningkatan pelayanan dan regulasi terkait perijinan usaha dan penanaman modal menjadi satu strategi penting yang akan dikelola dalam lima tahun kedepan.

Peran Bappeda dalam ikut mewujudkan misi kedua tersebut juga tidak terlepas dari fungsi koordinatifnya sebagai instansi perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, ekonomi kerakyatan atau usaha mikro-kecil, koperasi, ketenaga-kerjaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pasar dan investasi adalah ragam isu yang ditangani di bawah koordinasi bidang ekonomi. Dengan demikian, amanah yang diembanya adalah untuk memastikan bahwa misi penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing kota tercapai melalui koordinasi-koordinasi dengan OPD yang bertanggung-jawab dalam berbagai aspek ekonomi, serta berbagai pemangku kepentingan lain yang terkait.

Misi ketiga, yaitu memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota, difokuskan pada menurunnya tingkat kriminalitas dan berkurangnya pelanggaran aturan dan ketertiban, khususnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah/Perda. Pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut ditempuh melalui berbagai strategi, diantaranya adalah peningkatan wawasan kebangsaan, pengembangan kepemudaan dan keolah-ragaan, peningkatan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Dibawah koordinasi bidang social Bappeda, terutama sub-bidang pendidikan dan kebudayaan, serta sub-

bidang aparatur, diharapkan kerja-kerja OPD yang berkaitan bisa diarahkan untuk pencapaian misi ketiga ini.

Misi selanjutnya, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, social dan budaya, ditujukan untuk (1) meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta (2) meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Tujuan pertama menggunakan peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai tolok ukur keberhasilan, sedangkan tujuan yang kedua menggunakan kuantitas kelurahan budaya yang aktif sebagai ukuran pencapaian. Dalam bidang pendidikan, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indicator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Strategi yang coba diterapkan untuk mencapainya adalah dengan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, non-formal serta informal. Peningkatan pengembangan pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan.

Sementara itu dalam bidang kesehatan, meningkatnya harapan hidup masyarakat merupakan sasaran yang hendak dicapai, dengan tolok ukur naiknya angka harapan hidup, atau dengan tolok ukur lain tapi sejenis adalah turunya angka kematian. Untuk mencapainya, strategi yang akan diterapkan, diantaranya adalah dengan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan upaya pelayanan kesehatan, regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga.

Dalam bidang budaya, peran sesrta masyarakat diwujudkan dalam peningkatan jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif, dimana strategi yang diterapkan meliputi optimaliasai pelestarian warisan dan nilai budaya, pengembangan sejarah dan bahasa, serta optimalisasi pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi.

Beberapa OPD relevan dengan pencapaian misi ini, diantaranya adalah dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas kesehatan, RS Jogja, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan dinas kebudayaan. Bappeda, khususnya bidang yang menangani persoalan-persoalan perencanaan pembangunan social, untuk memastikan tercapainya misi keempat ini, perlu berkoordinasi secara intensif dengan OPD-OPD relevan yang disebutkan diatas, sehingga realisasi program/ kegiatan OPD tersebut benar-benar ada isinya dan relevan untuk pencapaian misi ke empat ini.

Misi kelima, yaitu memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan, dicapai dengan tujuan, (1) menciptakan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan, dan (2) lingkungan hidup yang berkualitas. Keberhasilan tujuan yang pertama diukur dari

semakin meningkatnya persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari perspektif rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Tujuan ini dicapai dengan beberapa strategi, diantaranya adalah peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang, peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, dan optimalisasi pengelolaan pertanahan. Sementara itu, keberhasilan untuk tujuan kedua diukur dari indeks kualitas lingkungan hidup. Strategi yang hendak dipakai diantaranya adalah peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup, optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) public. Karena sifatnya yang lintas sector, terutama tujuan yang pertama, banyak OPD yang ketugasannya relevan atas dua tujuan dari misi kelima ini. Dua diantaranya yang menjadi PD utama adalah dinas pertanahan dan tata ruang dan dinas lingkungan hidup. Bappeda, melalui bidang Fisik, perlu untuk melakukan pengawalan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, dan memastikan realisasi dari kebijakan, program dan kegiatan masing-masing OPD *on the right track* untuk tercapainya penguatan tata kelola dan kelestarian lingkungan.

Misi selanjutnya, yaitu membangun sarana dan prasarana public dan permukiman, memiliki tujuan untuk meningkatkan sebagaimana bunyi misi tersebut. Sasarannya adalah meningkatnya infrastruktur wilayah, yang meliputi jalan, jembatan, PJU, pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, pengurangan dan pengangkutan sampah, serta mitigasi bencana. Strategi yang diterapkan diantaranya adalah dengan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, saluran pengairan, dan drainase, penambahan pembangunan gedung pemerintah, peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan, peningkatan pengelolaan persampahan, lalu lintas dan perparkiran, peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas, peningkatan kesiap-siagaan dan penanggulangan bencana alam, serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Bappeda, terutama dibawah koordinasi bidang Fisik, memiliki peran untuk memastikan bahwa misi ini terampu dalam program/ kegiatan dari OPD yang terkait.

Terakhir, misi meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih terkait dengan banyak OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, satu diantaranya adalah Bappeda. Seperti yang telah disinggung, misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimana indeks reformasi birokrasi dijadikan tolok ukur keberhasilan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan pengadaan barang/ jasa, peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan secretariat daerah, peningkatan pelayanan kedinasaan pucuk pimpinan daerah, peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan di berbagai

bidang, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah, peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran, pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer, peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan, peningkatan perencanaan, pemanfaatan, dan inventarisasi asset, peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah, pengoptimalan pembukuan dan penagihan pajak daerah, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintah dan aparatur, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan di berbagai bidang, peningkatan dan evaluasi pengawasan, peningkatan pengembangan karir aparatur sipil Negara, peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara, peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan, penyelamatan data dan informasi arsip, pengoptimalan penyusunan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, peningkatan pengelolaan informasi dan statistic, peningkatan komunikasi public, pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, dan peningkatan pelayanan persandian. Tugas Bappeda, selain secara langsung ikut berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintah dalam bidang perencanaan, adalah dengan turut mengkoordinasikan OPD terkait yang ikut berperan dalam mewujudkan misi untuk memastikan tercapainya misi tersebut.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra DIY

Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah;

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara *evidence based*; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument*; (5) meningkatkan sosialisasi *tools* dan *instrument* terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk;

1. membangun hubungan yang efektif,
2. memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,
3. sinkronisasi pembangunan lintas wilayah,
4. sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah,
5. analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah,

6. peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah,
7. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah, dan
8. meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah,

Arah kebijakan ini menjadi bahan yang segar bagi Bappeda kota untuk memanfaatkan fokus kebijakan Bappenas tersebut.

Sementara itu, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Propinsi, yaitu Bappeda DIY, menyebutkan bahwa sasaran Bappeda DIY adalah :

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya
3. Tersedianya data statistik yang akurat (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas, Pemerintah Provinsi oleh Bappeda DIY dengan program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang

berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang

terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat. Pengembangan kawasan ini dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya. Kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya. Pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi. Dan yang terakhir, kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang.

Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan, yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan, seperti pada kawasan lindung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta

pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi

Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan, keempat program tersebut mempunyai pengaruh negative yang lebih besar dibandingkan program lainnya. Keempat program tersebut adalah; Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya; kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara untuk mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya; menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan demikian, dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang

publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta menurun dari 9,38% menjadi 7,7%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Bappeda Kota Yogyakarta pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
3. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.
6. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan dan juga permasalahan lain secara komprehensif dan terpadu.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan Rencana Rincinya.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda di presentasikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks perencanaan pembangunan	91,00	91,20	91,40	91,60	91,80	92,00

Tujuan jangka menengah Bappeda secara umum adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah yang meningkat. Indikator sasaran yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

**60% Capaian sasaran pemkot + 20% Sasaran perangkat daerah +
20% Capaian program perangkat daerah**

Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan adalah sebesar 90,8 poin. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2022 adalah sebesar 92 poin. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 0,2 poin. Dengan kata lain, target yang ingin dicapai adalah 91 poin ditahun pertama, atau di tahun 2017, dan tambahan 0,2 poin ditahun-tahun selanjutnya, sehingga indikator mencapai 92 poin di tahun terakhir Renstra.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Yogyakarta.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi,
 - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
- b. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik
 - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
- c. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial
 - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program sosial

- d. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
 - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
 - Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
- e. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
 - Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program sosial
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
		Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada table 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	91,00	91,20	91,40	91,60	91,80	92,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kota Yogyakarta. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kota Yogyakarta.

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta periode 2017-2022 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan		1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	812.616.172	100%	954.164.520	100%	982.789.456	100%	1.012.273.139	100%	1.042.641.333	100%	1.073.920.573	100%	4.804.484.620	Bappeda	Kec UH
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Materai yang tersedia - materai 6000 - materai 3000 Jasa Pengiriman/Paket STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar Roda 4 Roda 2 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Jasa kebersihan kantor Alat Tulis Kantor yang tersedia Jasa percetakan Jasa pengandaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Jasa pemeliharaan taman Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		434.001.500		554.325.000		570.954.750		588.083.393		605.725.894		623.897.671		2.753.090.537			
							750 buah		1000 buah		1000 buah		1000 buah		1000 buah		1000 buah		5000 buah			
							500 buah		750 buah		750 buah		750 buah		750 buah		750 buah		3750 buah			
							10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		50 kali			
							19 unit		27 unit		27 unit		27 unit		27 unit		27 unit		27 unit			
							3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
							16 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit			
							1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket			
							12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
							20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis		20 jenis			
							1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis			
							100.000 lembar		1.500.000 lembar		1.500.000 lembar		1.500.000 lembar		1.500.000 lembar		1.500.000 lembar		7.500.000 lembar			
							9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis			
							3 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis			
							6 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis			
							20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali			
							12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
							12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Keluaran : Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola Jasa Pengelola Arsip Jasa Tenaga Bantuan		77.278.672		34.619.520		35.658.106		36.727.849		37.829.684		38.964.575		222.113.831	Bappeda	Kec UH	
							4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis			
							50 dokumen ASN		46 dokumen pegawai		46 dokumen pegawai		46 dokumen pegawai		46 dokumen pegawai		46 dokumen pegawai		46 dokumen pegawai			
							1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang			
							1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang			
				Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi	Keluaran : Makan dan minum yang tersedia untuk : Koordinasi Pegawai Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		301.336.000		365.220.000		376.176.600		387.461.898		399.085.755		411.058.328		1.829.280.253	Bappeda	Kec UH	
							60 kali		60 kali		60 kali		60 kali		60 kali		60 kali		60 kali			
							46 orang		46 orang		46 orang		46 orang		46 orang		46 orang		46 orang			
							40 laporan		40 laporan		40 laporan		40 laporan		40 laporan		40 laporan		40 laporan			
				2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Indikator Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	100%		227.560.000	100%	275.040.450	100%	283.291.664	100%	291.790.413	100%	300.544.126	100%	309.560.450	100%	1.378.226.653	Bappeda	Kec UH
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Keluaran : Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat - Ruang Laktasi/Pojok ASI - Ruang Sekretariat TRPK/Ruang Rapat		125.900.000		107.520.450		110.746.064		114.068.445		117.490.499		121.015.214		575.725.458	Bappeda	Kec UH	
							1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
							1 unit															
							1 unit															
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda 4 - roda 2		101.660.000		167.520.000		172.545.600		177.721.968		183.053.627		188.545.236		802.501.195	Bappeda	Kec UH	
									27 unit		27 unit		27 unit		27 unit		27 unit		27 unit			
							3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
							16 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit		24 unit			
				3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Indikator Hasil : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%		-	100%	13.858.000	100%	14.273.740	100%	14.701.952	100%	15.143.011	100%	15.597.301	100%	57.976.703	Bappeda	Kec UH
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran:				-	13.858.000		14.273.740		14.701.952		15.143.011		15.597.301		57.976.703		

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan				1 kali														
					Bintek Peningkatan Kapasitas SDM Bappeda						1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali				
			4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Indikator Hasil : terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		59.105.000	100%	9.128.400	100%	9.402.252	100%	9.684.320	100%	9.974.849	100%	10.274.095	100%	97.294.821		Bappeda	Kec UH
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Keluaran :		59.105.000		9.128.400		9.402.252		9.684.320		9.974.849		10.274.095		97.294.821				
				Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)		5 dokumen			5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		25 dokumen				
				Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil)		5 dokumen			5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		25 dokumen				
			5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI	Indikator Hasil : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91%	91%	407.102.850	91%	607.119.100	91%	652.993.572	92%	703.010.368	92%	757.570.367	92%	817.114.134	92%	3.127.796.257		Bappeda	Kec UH
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan	keluaran :		107.991.450		395.155.700		434.671.270		478.138.397		525.952.237		578.547.460		1.941.909.054		Bappeda	Kec UH	
				Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen				
				Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen				
				Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen				
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen				
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen				
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen				
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen				
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen				
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I, II, III dan IV		4 dokumen													4 dokumen				
				Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan					1 dokumen										1 dokumen				
				Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan					1 dokumen										1 dokumen				
				Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan					1 dokumen										1 dokumen				
				Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan					1 dokumen										1 dokumen				
				Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan					1 dokumen										1 dokumen				
				Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional					1 dokumen										1 dokumen				
				Dokumen Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan						1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan						1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan						1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi						
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Keluaran:			92.876.450		93.776.800			96.590.104		99.487.807			102.472.441			105.546.615			485.203.602		
				Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		1 dokumen																		1 dokumen		
				Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya		1 dokumen																		1 dokumen		
				Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Ketagakerjaan		1 dokumen																		1 dokumen		
				Dokumen Review Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					1 dokumen															1 dokumen		
				Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					1 dokumen															1 dokumen		
				Dokumen Renja Perubahan Tahun n OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					1 dokumen															1 dokumen		
				Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					1 dokumen															1 dokumen		
				Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					1 dokumen															1 dokumen		
				Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata					1 laporan															1 laporan		
				Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif					1 laporan															1 laporan		
				Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi					1 laporan															1 laporan		
				Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						1 dokumen				1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen				4 dokumen		
				Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						1 dokumen				1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen				4 dokumen		
				Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						1 dokumen				1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen				4 dokumen		
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	Keluaran:			206.234.950		118.186.600			121.732.198		125.384.164		129.145.689			133.020.060				700.683.601		
				Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen																		1 dokumen		
				Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen																		4 dokumen		

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan	1 dokumen														1 dokumen		
					Dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah				1 dokumen											1 dokumen		
					Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah				1 dokumen											1 dokumen		
					Dokumen Renja Perubahan Tahun n OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah				1 dokumen											1 dokumen		
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah				1 dokumen											1 dokumen		
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah				1 dokumen											1 dokumen		
					Analisa Fiskal Daerah	1 laporan			1 laporan											2 laporan		
					Kajian Potensi Investasi di Kota Yogyakarta				1 dokumen											1 dokumen		
					Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah	1 laporan			1 laporan											2 laporan		
					Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD				1 laporan											1 laporan		
					Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen		
					Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis top down - bottom up sub bid Ekonomi Daerah					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen		
					Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen		
				6 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG FISIK	Indikator Hasil : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91%		1.992.811.146	91%	903.437.300	91%	930.540.419	92%	958.456.632	92%	987.210.331	92%	1.016.826.640	92%	5.772.455.827	Bappeda	Kec UH
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	Keluaran :			270.748.950		75.448.100		77.711.543		80.042.889		82.444.176		84.917.501		586.395.658	Bappeda	Kec UH
					Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen																
					Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen																
					Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen																
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen																
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen																
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen																
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen																
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen																
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen																
					Laporan Koordinasi Perencanaan Transportasi dan Jalan	1 dokumen																
					Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan	1 dokumen																
					Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo				1 dokumen													
					Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo				1 dokumen													
					Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo				1 dokumen													
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo				1 dokumen													
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo				1 dokumen													
					Laporan Strategis Perhubungan				1 laporan													
					Laporan Strategis Kominfo				1 laporan													
					Laporan Koordinasi Pokja Smartcity	1 laporan			1 laporan													
					Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen		

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
					Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid perhubungan dan kominfo						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	Keluaran :			439.182.900		306.682.800		315.883.284		325.359.783		335.120.576		345.174.193		1.722.229.343	Bappeda	Kec UH
					Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen												4 dokumen			
					Laporan Koordinasi Perencanaan Sarpras Permukiman		1 dokumen												1 dokumen			
					Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar permukiman		1 dokumen												1 dokumen			
					Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun)		1 dokumen												1 dokumen			
					Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan		1 dokumen												1 dokumen			
					Dokumen Pendampingan Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen										1 dokumen			
					Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU				1 laporan										1 laporan			
					Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman				1 laporan										1 laporan			
					Laporan Koordinasi Sanitasi				1 laporan										1 laporan			
					Luran Sekber Kartamantul				1 kali				1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
					Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
					Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
					Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Keluaran:			1.282.879.296		521.306.400		536.945.592		553.053.960		569.645.579		586.734.946		3.463.830.826		
					Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen												1 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen														1 dokumen		
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen														1 dokumen		
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen														1 dokumen		
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I, II, III dan IV	4 dokumen														4 dokumen		
					Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 dokumen														1 dokumen		
					Laporan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen														1 dokumen		
					Laporan Sekber Kartamantul	1 dokumen														1 dokumen		
					Laporan Penataan Kawasan Sungai	1 dokumen														1 dokumen		
					Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi	1 dokumen														1 dokumen		
					Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup	1 dokumen														1 dokumen		
					Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang	1 dokumen														1 dokumen		
					Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan	1 dokumen														1 dokumen		
					Penyusunan dokumen KLHS RPJMD	1 dokumen														1 dokumen		
					Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Sungai	1 dokumen														1 dokumen		
					Laporan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)	1 laporan			1 laporan											2 laporan		
					Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				1 dokumen											1 dokumen		
					Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				1 dokumen											1 dokumen		
					Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				1 dokumen											1 dokumen		
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				1 dokumen											1 dokumen		
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				1 dokumen											1 dokumen		
					Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan				1 laporan											1 laporan		
					Laporan Koordinasi Strategis Tata Ruang				1 laporan											1 laporan		
					Laporan Koordinasi Strategis Lingkungan Hidup				1 laporan											1 laporan		
					Laporan Koordinasi Ecodistrict				1 laporan											1 laporan		
					Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis Lingkungan				1 laporan											1 laporan		
					Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta				1 dokumen											1 dokumen		
					Laporan Koordinasi Monitoring Alih Fungsi Lahan				1 laporan											1 laporan		
					Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis				1 laporan											1 laporan		
					Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim				1 laporan											1 laporan		
					Dokumen Perencanaan Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		
					Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		
					Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		
				7 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL	Indikator Hasil : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91%		1.676.892.608	91%	739.267.700	91%	761.445.731	92%	784.289.103	92%	807.817.776	92%	832.052.309	92%	4.769.712.918	Bappeda	Kec UH
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan	Keluaran :			159.186.450		76.128.800		78.412.664		80.765.044		83.187.995		85.683.635		477.680.953		

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen													4 dokumen			
					Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan	1 laporan			1 laporan										2 laporan			
					Dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen										1 dokumen			
					Laporan Koordinasi Sektor Kebudayaan				1 laporan										1 laporan			
					Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pendidikan dan Kebudayaan					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	4 dokumen			
					Dokumen Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	4 dokumen			
					Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	4 dokumen			
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Keluaran :			1.321.124.708		608.775.100			627.038.353		645.849.504		665.224.989		685.181.738		3.868.012.653	
					Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen													4 dokumen			
					Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	1 dokumen													1 dokumen			
					Evaluasi pelaksanaan pendampingan pilot project Rapor Keluarga dan Segoro Amarto	1 dokumen													1 dokumen			
					Renstra Kemiskinan Tahun 2017-2021	1 dokumen													1 dokumen			
					Laporan Kota Sehat	1 dokumen													1 dokumen			
					Laporan Kota Inklusi	1 dokumen													1 dokumen			
					Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen													1 dokumen			
					Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan	1 laporan			1 laporan										2 laporan			
					Laporan Koordinasi Sektor Sosial	1 laporan			1 laporan										2 laporan			

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Laporan Kampung Taqwa Mrican		1 laporan													1 dokumen			
					Dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan				1 dokumen											1 dokumen			
					Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)				1 laporan											1 laporan			
					Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto				1 laporan											1 laporan			
					Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Perencanaan Sektor Kesejahteraan Rakyat					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen			
					Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Kesejahteraan Rakyat						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen			
					Dokumen perencanaan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Kesejahteraan Rakyat						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen			
				Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	Keluaran :			196.581.450		54.363.800			55.994.714		57.674.555		59.404.792		61.186.936		424.019.312		
					Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen			
					Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I, II, III dan IV		4 dokumen													4 dokumen			
					Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pemerintahan		1 dokumen													1 dokumen			
					Laporan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban		1 dokumen													1 dokumen			
					Pengendalian Evaluasi Pemerintahan		1 dokumen													1 dokumen			
					Laporan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 laporan											1 laporan			
					Dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur				1 dokumen											1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Aparatur				1 dokumen											1 dokumen			
					Dokumen Perencanaan Sektor Aparatur					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen			
					Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen			
					Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Aparatur					1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen			
				B PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Hasil : Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	91%		3.494.806.150	91%	2.243.583.800	91%	2.310.891.314	92%	2.380.218.053	92%	2.451.624.595	92%	2.525.173.333	92%	12.881.123.912	Bappeda	Kec UH	
				Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan	Keluaran :			1.614.169.950		1.079.811.500			1.112.205.845		1.145.572.020		1.179.939.181		1.215.337.356		6.131.698.496	Bappeda	Kec UH
					Penyusunan Raperda RPJMD 2017-2021		1 dokumen													1 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Dokumen RKPD Tahun 2018	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAAS Tahun 2018	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAAS Perubahan Tahun 2017	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Renja SKPD	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Renstra SKPD	1 dokumen													1 dokumen			
					Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD 2017 - 2021	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2018	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2018	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen													1 dokumen			
					Musrenbang RPJMD	1 kali													1 kali			
					Dokumen Hasil Forum SKPD	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD	1 dokumen													1 dokumen			
					Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan dan Bantuan Keuangan	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Penyusunan Pedoman RPJMD Kelurahan Kota Yogyakarta 2017 - 2021	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Analisis "Money Follow Program" dalam RPJMD 2017-2022				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Analisis Tindak Lanjut Perencanaan Teknokratis				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen SDG's Kota Yogyakarta				1 dokumen										1 dokumen			
					Dokumen Review RPJMD 2017-2022				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen RKPD Tahun (n+1)				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen RKPD Perubahan Tahun (n)				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAAS Tahun (n+1)				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAAS Perubahan Tahun N				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Renja OPD				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Review Renstra OPD				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta N+1				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta N+1				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun N+1				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Hasil Forum OPD				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Buku Pedoman Musrenbang RKPD N+1				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
					Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD	Lokasi	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Dokumen perencanaan teknokratis, top down-bottom up sub bid Perencanaan						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen				
				Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan	Keluaran :			543.167.850		576.163.200			593.448.096		611.251.539		629.589.085		648.476.758		2.953.619.770	Bappeda	Kec UH
					Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil RPJPD		1 dokumen													1 dokumen			
					Evaluasi Kebijakan RPJMD		1 dokumen													1 dokumen			
					Evaluasi Pelaksanaan RPJMD		1 dokumen													1 dokumen			
					Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD		1 dokumen													1 dokumen			
					Evaluasi Kebijakan RKPD		1 dokumen													1 dokumen			
					Evaluasi Pelaksanaan RKPD		1 dokumen													1 dokumen			
					Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen													4 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD		1 dokumen													1 dokumen			
					Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen													4 dokumen			
					Monitoring dan Evaluasi APBN, DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		1 dokumen													1 dokumen			
					Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan, dan Bantuan Keuangan		1 dokumen													1 dokumen			
					Sinkronisasi Perencanaan - Penganggaran		1 dokumen													1 dokumen			
					Sinkronisasi Prioritas Pusat Daerah		1 dokumen													1 dokumen			
					Laporan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun		1 dokumen													1 kali			
					Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 Dokumen			
					Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV			6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	30 Dokumen	-		
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	10 Dokumen	-		
					Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV			6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-	30 Dokumen	-		
					Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari Pusat			1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
					Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan			1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan	-		
					Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari DIY			1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan	-		
					Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan			1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
					Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Daerah			1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
					Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal			1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
					Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang			1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
					Evaluasi RPJPD						1 dokumen									1 dokumen			
					Dokumen evaluasi teknokratis, top down-bottom up sub bid Pengendalian						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen				
				Kegiatan Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	Keluaran :			1.337.468.350		587.609.100			605.237.373		623.394.494		642.096.329		661.359.219		3.795.805.646	Bappeda	Kec UH
					Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni		1 dokumen													1 dokumen			
					Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan		1 dokumen													1 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Indikasi Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018	1 dokumen													2 dokumen			
					Pengembangan Data dan Informasi	2 dokumen													2 dokumen			
					Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta				1 dokumen										1 dokumen	-		
					Dokumen Data Kewilayahan	1 dokumen													1 dokumen			
					Dokumen Data Sektoral	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	5 dokumen	-		
					Analisa Data	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	5 dokumen	-		
					Data Series SIPD	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	5 dokumen	-		
					Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
					Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS				1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan	-		
				9 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Indikator Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	49%		1.278.548.850	51%	1.791.047.000	53%	1.844.778.410	55%	1.900.121.762	57%	1.957.125.415	59%	2.015.839.178	59%	8.771.621.437	Bappeda	Kec UH
				Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	Keluaran :		625.313.850		494.867.200		509.713.216		525.004.612		540.754.751		556.977.393		2.695.653.629	Bappeda	Kec UH	
					Buku Jurnal Jarlit 2017	5 dokumen																
					Buku Inventarisasi Hasil Penelitian	80 Buku																
					Anugerah Penelitian	1 dokumen																
					Kajian Keuangan Daerah	1 dokumen																
					Laporan E-jarlit dan E-jurnal	1 laporan																
					Dokumen Penelitian	5 dokumen			5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		25 Dokumen			
					Buku Jurnal Jarlit				1 jenis buku		1 jenis buku		1 jenis buku		1 jenis buku		1 jenis buku		5 jenis buku			
					Buku Inventarisasi Hasil Penelitian	1 jenis buku					1 jenis buku		1 jenis buku		1 jenis buku		1 jenis buku		3 jenis buku			
					Dokumen Penelitian Strategis Tematik				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					
					Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					
					Jurnal Jarlit Kota Yogyakarta				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					
				Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	Keluaran :		555.960.000		816.501.000		840.996.030		866.225.911		892.212.688		918.979.069		3.971.895.629	Bappeda	Kec UH	
					Dokumen Analisa Kebijakan	1 dokumen			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen			
					Kajian Smart City Tahap II	1 dokumen																
					Masterplan Transportasi Perkotaan	1 dokumen																
					Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah				1 dokumen													
					Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis)				1 dokumen													
					Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
					Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan II				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			
				Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah	Keluaran :		97.275.000		479.678.800		494.069.164		508.891.239		524.157.976		539.882.715		2.104.072.179	Bappeda	Kec UH	
					Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida)	1 dokumen													1 dokumen			
					Anugerah Inovasi dan Penelitian				2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		10 jenis			
					Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi				1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
					Dokumen Perancangan Inovasi Daerah				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
					Laporan Forum Inovasi Daerah				1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan			
					Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDA)				1 dokumen										1 dokumen			
								9.949.442.776		7.536.646.270		7.790.406.557		8.054.545.743		8.329.651.803		8.616.358.013		41.660.693.149		